

EVALUATION of FAMILY PLANNING VILLAGE PROGRAM in IMPROVING FAMILY WELFARE (STUDY on PARAIKATTE VILLAGE, BAJENG DISTRICT, GOWA REGENCY

Haedar Akib¹, Dwi Hastuti², Muh.Nur Yamin^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

*e-mail Correspondence: nuryamin1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the results of the implementation of the Kampung KB program in improving family welfare and the impact of the Kampung KB program in Paraikatte Village. This type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the implementation of the Family Planning Village program in Paraikatte Village in an effort to improve family welfare have referred to 8 family functions, but there are still obstacles in the field. This is because participation from the community is still lacking due to a lack of advocacy from field line officers and funds for activities are still lacking because they rely on community self-help and village funds. The impact of the Kampung KB program in improving family welfare in Paraikatte Village is still not optimal, seen from the increase in Pre KS + KS1, which means that the poor community still cannot be completed, so it can be concluded that the Kampung KB program is still not enough to be able to improve family welfare in Paraikatte Village.

Keywords: Evaluation, Kampung KB, Family Welfare

PENDAHULUAN

Indonesia sampai saat ini masih berupaya dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang pada dasarnya mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum (Fahrudin, 2018).

Keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting (Syamsuddin, 2018). Keluarga adalah institusi sosial terkecil dan sekaligus menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan akan moralitas, cinta kasih, sosial budaya dan berbagai aspek lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengalaman Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk. Oleh sebab itu,

elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat merupakan salah satu akar kekuatan dalam pembangunan nasional.

Menurut Soejipto dalam (Ramadhaini, 2022: 34) kesejahteraan keluarga merupakan keadaan dimana terciptanya kehidupan harmonis yang membuat kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga terpenuhi, tanpa mengalami hambatan yang serius serta dalam menghadapi masalah keluarga dapat diatasi dengan mudah bersama dengan anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud.

Pentingnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam pembangunan nasional, maka dilakukan berbagai program untuk mendukung tujuan tersebut. Diharapkan dengan pembentukan program tersebut dapat memberikan manfaat serta dapat secara langsung bersentuhan dengan masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Salah satu dari program tersebut yaitu dilakukan melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan salah satu program yang bertujuan dalam mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Program Kampung KB hadir untuk membangun, mensejahterakan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau dengan kriteria tertentu dimana keterpaduan program pembangunan antara program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga melalui pelaksanaan sektor terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Ketahanan keluarga ini yang akan mencegah dan menyembuhkan terjadinya permasalahan sosial dan keluarga pulalah yang menjadi sumber utama dalam pengembangan dan pencapaian tujuan pembangunan.

Program Kampung KB ini telah diterapkan diseluruh daerah di Indonesia dengan total Kampung KB yang sudah dicanangkan sampai tahun 2022 yaitu sebanyak 17.324 Kampung KB. Sedangkan di provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 690 Kampung KB yang sudah dicanangkan (BKKBN, 2022).

Salah satu Desa yang melaksanakan program Kampung KB ini adalah Desa Paraiatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat dikatakan bahwa Dusun Pattunggaleng telah menjalankan program Kampung KB ini dengan baik. Sejalan akan pentingnya penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang efektif bagi pembangunan nasional. Segi elemen keberhasilan akan peningkatan keluarga sejahtera juga masih belum tercapai, dilihat dari masih banyaknya populasi penduduk dan tingginya angka kemiskinan yang mana di Desa Paraiatte dalam satu tahun terakhir terdapat 405 jumlah Kartu Keluarga (KK) yang termasuk sebagai keluarga miskin dalam keseluruhan jumlah KK di Desa Paraiatte sebanyak 946 KK, sehingga dapat dinilai belum bisa menjadikan kesejahteraan dalam sebuah keluarga, karena diakibatkan oleh kemiskinan pada masyarakat yang belum dituntaskan. Kegiatan tersebut tidak dioptimalkan dengan baik dan masih butuh banyak peningkatan.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap sebuah program pembangunan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan informasi mengenai capaian dari program tersebut. Menurut Arifin (2016) evaluasi adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menentukan kualitas dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Wirawan (2012) evaluasi dibedakan jenis-jenisnya berdasarkan objek, berikut merupakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya: a. Evaluasi kebijakan, b. Evaluasi program, c. Evaluasi proyek, dan d. Evaluasi material.

Program merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program merupakan metode sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan memakai informasi guna menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi program dapat dikelompokkan sebagai evaluasi masukan (*input evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).

Edward A. Suchman dalam (Putri & Yamin, 2022) mengemukakan bahwa terdapat enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Tujuan program, mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah, mengidentifikasi hambatan-hambatan masalah yang terjadi selama proses pelaksanaan program.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan, kegiatan yang dilakukan dengan upaya untuk mengetahui standar yang telah ditetapkan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.
4. Pengukuran perubahan, pengukuran terhadap tindakan perubahan yang terjadi dalam suatu program.
5. Pengukuran terhadap akibat dari kegiatan, menentukan perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Dampak program, beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak dalam program.

Terdapat beberapa indikator atau kriteria dalam evaluasi yang dikembangkan atau disempurnakan oleh William N. Dunn dalam (Akbar & Mohi, 2018: 18) mencakup enam indikator, a. Efektifitas, b. Efisiensi, c. Kecukupan, d. Pemerataan, e. Responsivitas, dan f. Ketepatan.

Evaluasi berfungsi sebagai bahan rekomendasi pengambilan keputusan program, sehingga hasil akhir dari sebuah evaluasi dapat menjadi usulan rekomendasi berdasarkan hasil analisis mendalam yang telah dilakukan. Ambiyar & Muharika (2019: 25-26) merumuskan tujuan dan fungsi evaluasi program yaitu antara lain :

- a. Sebagai pertimbangan dalam menghadirkan rekomendasi bagi pengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan program yang sedang berlangsung maupun rekomendasi terhadap program yang selesai dilaksanakan.
- b. Sebagai penentu keefektifan pencapaian tujuan program, baik itu program jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Sebagai bahan analisis dalam menentukan kekuatan juga kelemahan yang dimiliki sumberdaya program.
- d. Sumber keputusan dalam melanjutkan, mengembangkan bahkan menghentikan bagian mana yang akan diperbaiki dari program.

Kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari suatu program, karena dari masukan hasil evaluasi program akan membuat para pengambil keputusan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau akan dilaksanakan. Wujud dari sebuah evaluasi adalah rekomendasi dari evaluator (penilai) untuk pengambil keputusan. Arikunto dan Jabar (2014) menyatakan bahwa ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan sebuah program keputusan, antara lain :

- 1) Menghentikan program, karena program tersebut dianggap tidak memiliki manfaat atau tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
- 2) Merevisi program, karena ada bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat sedikit kesalahan).
- 3) Melanjutkan program, karena dinilai program terlaksana sesuai harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
- 4) Menyebarkan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi program dilain waktu), karena program memberikan hasil yang baik maka akan sangat baik jika dilaksanakan juga di tempat dan waktu yang lain.

Jadi, evaluasi program memiliki manfaat sebagai alat dalam memberikan rekomendasi terhadap suatu program yang mana dapat dilanjutkan, dihentikan, disebarluaskan, ataupun diperbaiki. Dimana hal tersebut merupakan sebuah kebaikan untuk semua unsur dalam suatu program.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena akan mengungkapkan data berdasarkan pengamatan dan menyajikan data tentang fakta di lapangan secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung KB (KB) Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Fokus penelitian ini memfokuskan pada Evaluasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, yang menggunakan teori evaluasi kebijakan Edward A. Suchman yang terdiri atas tujuan program, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran perubahan, pengukuran terhadap akibat dari kegiatan dan dampak program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah pembahasan hasil penelitian evaluasi program Kampung KB Desa Paraikatte dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menggunakan enam langkah evaluasi kebijakan yakni tujuan program, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran perubahan, pengukuran terhadap akibat dari kegiatan dan dampak program.

1. Tujuan program

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pelaksanaan Kampung KB di Desa Paraikatte telah mengaktualisasikan delapan fungsi keluarga dalam berbagai kegiatannya, yang mana 8 fungsi keluarga tersebut yaitu:

- a. Keagamaan, program kegiatannya berupa belajar mengaji dan pembinaan qasidah tiap Dusun. Agama merupakan kebutuhan dasar setiap manusia

maka dilakukannya serangkaian kegiatan ini dengan tujuan dapat memberikan panutan yang baik dalam ibadah dan perilaku kepada anak.

- b. Pendidikan, program kegiatannya berupa pembinaan posyandu lansia dan balita, sosialisasi hukum dan pendidikan paud tiap dusun. Fungsi sosialisasi dan pendidikan ialah untuk memberikan bekal masa depan dan membentuk karakter anak.
- c. Reproduksi, program kegiatannya yakni penyediaan alat kontrasepsi, kelas Ibu hamil dan balita dan pemutakhiran data KK. Keluarga sebagai tempat mengembangkan reproduksi yang sehat dan berencana sekaligus tempat dalam memberikan informasi mengenai hal-hal berkaitan seksualitas untuk melanjutkan keturunan yang terencana demi tercapainya kesejahteraan keluarga.
- d. Ekonomi, keluarga adalah tempat untuk memperoleh kebutuhan material yang harus didukung dengan finansial, maka dari itu program kegiatan ini dilakukan untuk membina masyarakat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Program kegiatan ekonomi Desa Paraikatte meliputi, pengembangan usaha bersama yakni ternak bebek, kue kering, besek dan kelompok jahit.
- e. Perlindungan, tempat bernaung dan menumbuhkan rasa aman datang dari keluarga. untuk itu program kegiatan dari perlindungan meliputi, penyuluhan bahaya narkoba serta pengaktifan pos ronda.
- f. Kasih sayang, program kegiatannya berupa pemberian sayuran dan buah bagi ibu hamil demi mencegah stunting, pemberian susu dan telur bagi penderita stunting dan bayi kurang gizi.
- g. Sosial budaya, nilai luhur dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat perlu dikembangkan dan keluarga sebagai wahana pertama dalam belajar beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Di Desa Paraikatte program kegiatan sosial budaya berupa, membentuk kelompok ganrang, membentuk grup petani dan sosialisasi budi pekerti.
- h. Pembinaan lingkungan, peduli akan lingkungan sekitar akan memberikan kelestarian alam dan memberikan lingkungan terbaik bagi generasi mendatang. Program kegiatan pembinaan lingkungan yaitu, kerja bakti, pemanfaatan pekarangan, penanaman sayuran dan buah.

2. Analisis terhadap masalah

Kampung KB di Desa Paraikatte tak lepas dari adanya hambatan yang dapat memengaruhi pelaksanaan program. Anggaran dana kegiatan Kampung KB selama ini diperoleh dari swadaya masyarakat dan beberapa program kegiatan diikutsertakan dengan kegiatan sektor lain menggunakan dana desa. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan program Kampung KB di Desa Paraikatte karena kurangnya dana dan pemerintah setempat juga bingung dalam menjalankan program kegiatan karena dari pusat sendiri tidak mengalokasikan dana untuk setiap wilayah Kampung KB.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pula hambatan lainnya yaitu kemampuan advokasi pokja Kampung KB dan pendamping belum merata, sehingga pengalokasian kegiatan Banggakencana di Kampung KB masih tergolong minim. Penyuluh lapangan diharapkan aktif dalam melakukan advokasi. Dalam hal ini penyuluh/PLKB melakukan advokasi kepada pokja dan pemerintah setempat harus bagus, jelas dan terarah agar dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatannya dapat berjalan lancar.

3. Dskripsi dan standarisasi kegiatan

Dalam buku pedoman Kampung KB disebutkan bahwa dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB dikoordinasikan oleh perwakilan BKKBN provinsi dengan melibatkan seluruh unsur struktur organisasi Kampung KB melalui musyawarah. Selanjutnya dokumen rencana program hasil dari rapat dan kegiatan Kampung KB yang telah direkap kemudian dilaporkan kepala BKKBN dengan ditembuskan kepada Direktorat Bina Lini Lapangan dan Biro Perencanaan BKKBN.

Dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas yaitu dengan menyesuaikan antara kelompok sasaran dengan apa yang ditawarkan program. Dalam hal ini kelompok sasaran program Kampung KB yaitu, Balita, Remaja, Lansia, dan PUS. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Kampung KB di Desa Paraikatte melakukan program kegiatan bernama tribina yang terdiri atas BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia).

BKB merupakan kegiatan khusus pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang baik dan benar. BKR merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok keluarga yang memiliki remaja (Usia 10-24) untuk pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah. Dan BKL merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian keluarga.

4. Pengukuran perubahan

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah dasar dari pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menekankan kepada BKKBN untuk tidak hanya terbatas pada masalah pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera saja, akan tetapi juga masalah pengendalian penduduk.

Pengguna akseptor KB aktif mengalami peningkatan selama Desa Paraikatte dicanangkan sebagai Kampung KB, dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 55% sampai pada tahun 2022 yang sudah berada pada angka 69%. Peningkatan tersebut tak lepas dari para petugas lini lapangan dalam mengedukasi masyarakat agar menggunakan KB demi menekan laju pertumbuhan penduduk.

Penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) di Desa Paraikatte juga mengalami peningkatan yang baik sejak pencanangan program Kampung KB. Dilihat dari tahun 2015 hanya 5% pengguna MKJP sampai pada tahun 2022 sudah sebanyak 15% penduduk Desa Paraikatte sudah menggunakan MKJP.

Lain halnya dengan indikator Pra KS (Sangat Miskin) + KS1 (Miskin) mengalami peningkatan, tahun 2015 sebanyak 83%, kemudian pada tahun 2019 menurun ke angka 54%, namun ditahun 2022 meningkat lagi sebanyak 67%. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi petugas lini lapangan Kampung KB Desa Paraikatte karena konsistensi penurunan dari laju indikator Pra KS + KS1 yang kurang baik.

5. Pengukuran terhadap akibat dari kegiatan

Keberadaan Kampung KB di Desa Paraikatte dengan berbagai programnya membuat masyarakat khususnya kaum Ibu, calon Ibu dan PUS lebih memperhatikan dan sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi. Mengingat banyaknya keluarga di Desa Paraikatte yang memiliki lebih dari dua anak, jarak anak yang terlalu dekat,

pernikahan dini dan masih banyak lagi. Bukan hanya membahayakan bagi calon bayi tapi juga membahayakan calon Ibu.

Semenjak dicanangkan menjadi Kampung KB, partisipasi masyarakat Desa Paraiatte akan ber-KB sudah meningkat didukung dengan pendampingan langsung dari para Kader yang mengedukasi serta memotivasi masyarakat agar dapat menggunakan KB bukan hanya untuk mewujudkan tujuan program Kampung KB tapi juga dapat mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

6. Dampak program

Akibat dari pelaksanaan program Kampung KB di Desa Paraiatte memberikan keuntungan khusus bagi wilayah yang ditunjuk sebagai Kampung KB karena akan mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten dalam memperbaiki Kampung KB menjadi daerah yang lebih maju. Dengan kata lain, dari kekurangan tersebut akan dilakukan percepatan perkembangan wilayah menjadi lebih baik dengan berbagai program kegiatan yang difokuskan pada Kampung KB. Dampak Kampung KB terhadap masyarakat setempat juga memberikan dampak positif dimana sebelumnya masyarakat menganggap menggunakan KB merupakan hal yang tidak perlu, sekarang masyarakat sudah sadar akan perencanaan keluarga dan ikut menjadi akseptor aktif dengan sendirinya.

Berdasarkan hal tersebut program Kampung KB di Desa Paraiatte memiliki dampak positif baik bagi masyarakat ataupun terhadap lembaga atau sistem sosial dimana pemerintah desa dapat menjalankan program Kampung KB untuk dapat menyelesaikan program pemerintah juga sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menekankan pada kesehatan ibu dan anak, kesehatan keluarga dengan remaja dan lansia demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan program Kampung KB di Desa Paraiatte sudah mengacu pada 8 fungsi keluarga dalam menjalankan program kegiatan. Dengan melaksanakan kegiatan tribina yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia) beserta kegiatan lintas sektor, meskipun partisipasi dari masyarakat masih kurang karena kurangnya advokasi dari petugas lini lapangan serta kurangnya pemahaman masyarakat akan program Kampung KB. Sejauh ini anggaran dana kegiatan Kampung KB menggunakan dana desa dan swadaya masyarakat, namun masih kurang mencukupi. Jika dilihat dari penggunaan akseptor aktif dan MKJP mengalami peningkatan yang baik dari tahun ke tahun sejak pencanangan. Dampak program Kampung KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Paraiatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dinilai masih belum optimal dilihat dari peningkatan Pra KS + KS1 yang mana artinya masyarakat miskin masih belum dapat dituntaskan, walaupun pelaksanaan programnya sudah efektif dan telah sesuai dengan standarisasi dan sudah tepat sasaran namun jika masyarakat miskin masih mengalami peningkatan maka masih belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing.
- Ambiyar, & Muharika. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Alfabeta.

- Arifin, Z. (2016). *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik dan Prosedur*. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. PT. Bumi Aksara.
- BKKBN. (2022). *Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)*. BKKBN. <https://kampungkb.bkkbn.go.id>
- Fahrudin, A. (2018). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga*. (2014).
- Putri, M. U., & Yamin, M. N. (2022). Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar). *Pinisi Journal of Social Science, Vol.1*, 1-10.
- Ramadhiani, E. (2022). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Studi Kasus Kampung KB RPTRA DELAS)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syamsuddin. (2018). *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*. Wade Group.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. (2009).
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. RajaGrafindo.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing.
- Ambiyar, & Muharika. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Alfabeta.
- Arifin, Z. (2016). *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik dan Prosedur*. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. PT. Bumi Aksara.
- BKKBN. (2022). *Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)*. BKKBN. <https://kampungkb.bkkbn.go.id>
- Fahrudin, A. (2018). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga*. (2014).
- Putri, M. U., & Yamin, M. N. (2022). Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar). *Pinisi Journal of Social Science, Vol.1*, 1-10.
- Ramadhiani, E. (2022). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Studi Kasus Kampung KB RPTRA DELAS)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syamsuddin. (2018). *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*. Wade Group.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. (2009).
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. RajaGrafindo.